

ORGANISASI PERSATUAN PERJUANGAN 1946

Achmad Januar Amroni
Jurusan Pendidikan Sejarah
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Surabaya
E-mail: januar_edo@ymail.com

Sumarno
Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Surabaya

Abstrak

Pada masa awal kemerdekaan Indonesia dihadapkan pada situasi yang sangat sulit. Yakni Pemerintah yang dipimpin oleh perdana Menteri Sutan Syahrir dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia menempuh jalan diplomasi mendapat tentangan keras dari kelompok Tan Malaka yang terbentuk dalam Organisasi Persatuan Perjuangan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah : apa latar belakang di bentuknya Organisasi Persatuan Perjuangan, dan bagaimana dampak dibentuknya Organisasi Persatuan Perjuangan 1946.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penulisan sejarah yang meliputi heuristik, kritik, interpretasi, dan tahap yang terakhir adalah historiografi. Pada tahap heuristik dapat dikumpulkan beberapa sumber antara lain : OMI Doc.NO 5503 p.2 (djogja documenten no.65), Laporan kementerian Penerangan, 21 juli 1947 (kem.Penerangan no.239), Laporan Kepala Kementerian Pertahanan Bagian B 21 - 12 - 1946 (djogja documentenno.354). Kemudian dari sumber koran atau majalah antara lain : Surat kabar *Merdeka Mingguan Oentoek Rakjat* edisi 6 Djuli 1946 No.8 halaman 4, Surat kabar *Negara Baroe* edisi 8 djoeli 1946 artikel *Tan Malaka CS. Mentjoba Mereboet Kekuasaan*. Setelah itu, penulis melakukan kritik dengan cara membandingkan sumber-sumber yang telah diperoleh baik itu koran, majalah atau buku tentang konfrontasi pemerintah (kabinet Syahrir) dengan Organisasi Persatuan Perjuangan dan dampaknya terhadap pemerintahan Indonesia tahun 1946. Kemudian pada tahap Interpretasi, disimpulkan dan ditafsirkan fakta-fakta yang diperoleh untuk diinterpretasikan sesuai dengan topik yang akan dibahas. Tahapan terakhir adalah historiografi, peneliti berusaha merangkai fakta sejarah yang sudah diklasifikasikan secara kronologis menjadi sebuah karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan keilmiahannya sesuai dengan ketentuan metode penelitian sejarah.

Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut, bahwa dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan, dikalangan bangsa Indonesia terbagi atas dua golongan. Yang pertama berpendapat bahwa perjuangan itu harus dijalankan dengan jalan diplomasi guna mencegah jatuhnya korban sia-sia, sedangkan yang kedua condong kepada perjuangan bersenjata, karena mengandalkan semangat, keberanian dan kekuatan bangsa (terutama para pemudanya). Kenyataannya, pemerintah memilih jalan yang pertama, sehingga golongan pendukung jalan kedua menjadi kecewa dan menggalang persatuan dalam wadah yang disebut Persatuan Perjuangan PP. Bila semula PP dimaksudkan untuk menghadapi musuh (terutama belanda).

Namun yang terjadi adalah PP tidak lain merupakan alat dari sekelompok orang (terutama Tan Malaka CS.) untuk mengambil alih kekuasaan pemerintahan negara. Oposisi terhadap pemerintah RI (Syahrir) tidak menunjang perjuangan bangsa, malahan membahayakan kesatuan dan persatuan bangsa. Peristiwa 27 Juni 1946 jelas merupakan tindakan sabotase terhadap kebijakan politik pemerintah, dan peristiwa 3 Juli 1946 jelas pula merupakan bukti tindakan makar/kudeta dari golongan Tan Malaka Cs. Untuk dapat memegang kekuasaan pemerintahan negara melalui aksi yang dilakukan oleh Jendral Sudarsono.

Sebagai negara hukum, maka teradap mereka yang bersalah dikenakan hukuman. Tetapi mengingat tindakan-tindakan di atas dilandasi dan didorong oleh kesetiaan, kecintaan kepada bangsa dan negara maka pembebasan golongan Tan Malaka Cs. Atas grasi Presiden pada tanggal 17 Agustus 1948 kiranya di maklumi.

Kata Kunci : Mempertahankan kemerdekaan, Perjuangan Diplomasi, Perjuangan Bersenjata.

ABSTRACT

In the early days of Indonesian independence faced with a very difficult situation. Namely the Government, led by Prime Minister Sutan Syahrir in maintaining the independence of Indonesia on the path of diplomacy gets stiff opposition from Tan Malaka group formed in Perjuangan Unity Organization. The problem in this study is: what is the background shape Organizations Struggle Union, and how it impacts the formation of the Union of Organizations Struggle 1946.

In this study the authors use the method of writing history that includes heuristics, criticism, interpretation, and the last stage is historiography. At this stage of heuristics can be collected several sources, among others: OMI Doc.NO 5503 p.2 (djogja documenten 65), Report of the Ministry of Information, 21 July 1947 (kem.Penerangan 239), Report of the Ministry of Defence Head Part B 21 - 12-1946 (djogja documentenno.354). Then from the source newspaper or magazine among other things: the Free Weekly Newspaper of the People Oentoek 6 issue 4 page 8 of July 1946, the State Newspaper Baroe 8 edition djoeli 1946 CS Tan Malaka article. Power Mereboet try to pool. After that, the author critiques by comparing the sources that have been obtained both newspapers, magazines or books about the confrontation of government (cabinet Syahrir) with Unity Organization of Struggle and its impact on the Indonesian government in 1946. Later in the interpretation phase, inferred and interpreted the facts -facts obtained to be interpreted in accordance with the topics to be discussed. The final stage is historiography, researchers are trying to assemble a fact of history that have been classified chronologically into a scientific work of scholarship that can be justified in accordance with the methods of historical research.

The results of this study are as follows, that in the struggle for independence and kedualatan, among Indonesian people divided into two groups. The first argues that the struggle must be carried out by way of diplomacy in order to prevent casualties in vain, sedangkan second inclined to armed struggle, because it relies on the spirit, courage and strength of the people (especially the youth). In fact, the government chose the first path, so the group became disillusioned supporters of both road and unity in a container called the Union of Struggle PP. When PP was originally intended to confront the enemy (mainly Dutch).

But what happened is no other PP is a tool of a group of people (especially CS Tan Malaka.) To take over the power of state governments. Opposition to the government of Indonesia (Syahrir) does not support the struggle of nations, even jeopardize the unity and integrity of the nation. Events of June 27, 1946 clearly an act of sabotage against government policies, and events July 3, 1946 is also clear evidence of treason / Tan Malaka coup of class Cs. To be able to hold the executive power through the actions taken by the General Sudarsono. As a state law, then they are guilty terhadap penalties. But given the above actions based on and driven by loyalty, devotion to the nation and the liberation of the country Tan Malaka Cs. Above pardon President on August 17, 1948 presumably understandable.

Keywords: Maintaining independence, Struggle Diplomacy, Armed Struggle

PENDAHULUAN

Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 agustus 1945 adalah buah pikiran pemimpin-pemimpin terkemuka Indonesia. Ini berarti bahwa saat ini bangsa Indonesia lepas bebas dari ikatan-ikatan kolonial dengan kemampuan dan kekuatan sendiri. Tindak lanjut dari pada itu ialah menyusun suatu ketatanegaraan baru dan menentukan sikap serta tindakan dalam menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang timbul, baik dari dalam maupun luar negeri. Pada tanggal 18 agustus sampai dengan 5 oktober 1945 berhasil diambil keputusan dan pembentukan organ-organ kelengkapan negara yang dalam prosesnya terbuka kemungkinan-kemungkinan perubahan kearah yang lebih baik bagi perjuangan bangsa Indonesia.

Maklumat Pemerintah

Partai politik anjuran pemerintah

Tentang pembentukan partai-partai politik Berhubungan dengan usul Badan Pekerja Komite Nasional Pusat kepada Pemerintah, supaya memberikan kesempatan kepada Rakyat seluas-luasnya untuk mendirikan partai-partai politik, dengan restriksi, bahwa partai-partai itu hendaknya memperkuat perjuangan kita mempertahankan

kemerdekaan dan menjamin keamanan masyarakat, Pemerintah menegaskan pendiriannya yang telah diambil beberapa waktu yang lalu bahwa:

1. Pemerintah menyukai timbulnya partai-partai politik, karena dengan adanya partai-partai itulah dapat dipimpin kejalan yang teratur segala aliran paham yang ada dalam masyarakat.
2. Pemerintah berharap supaya partai-partai itu telah tersusun, sebelumnya dilangsungkan pemilihan anggota Badan-Badan Perwakilan Rakyat pada bulan Januari 1946.

Jakarta, 3 November 1945
WAKIL PRESIDEN
MOHAMAD HATTA.¹

Sistem Kabinet Parlementer yang dijalankan RI didahului dengan maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945 tentang pembentukan partai-partai politik; dimaksudkan untuk menunjukan kepada dunia luar bahwa RI menjalankan paham demokrasi bukan

¹ Berita Republik Indonesia Tahun I No. 2 halaman 10 kolom 3

fasisme. Susunan kabinet baru bentukan Syahrir yang berbau Belanda semata-mata untuk memberi kesan RI mempunyai *goodwill* terhadap Belanda. Begitulah perubahan-perubahan yang terjadi di Indonesia yang antara lain yang menyangkut sistem pemerintahan dan sistem kepartaian, secara dominan timbul karena pengaruh dari luar (faktor eksteren).

Dengan demikian jelaslah bahwa tindakan-tindakan politik yang dilakukan kelompok Syahrir, meskipun menyimpang dari konstitusi, menampilkan syahrir sebagai perdana menteri adalah untuk menyelamatkan dan mengamankan kelangsungan hidup RI dari ancaman atau bahaya yang datang dari luar. Selanjutnya sikap tetap mempertahankan Sukarno-Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden bangsa Indonesia adalah untuk menjaga keutuhan persatuan nasional Indonesia.

Sebagai bangsa yang beraneka ragam coraknya maka gagasan yang timbul untuk mempertahankan kemerdekaan negara juga berbeda-beda. Secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 2 golongan yakni golongan yang menganut jalan diplomasi dan golongan yang menganut perjuangan bersenjata. Dalam sidang pelantikan KNIP tanggal 29 agustus 1945, Bung Karno selaku presiden telah menggariskan bahwa jalan yang ditempuh untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan mencari pengakuan internasional bagi RI ialah jalan diplomasi.²

Jalan diplomasi yang ditempuh oleh kabinet Sukarno untuk melaksanakan cara tersebut kemudian dapat diatasi oleh kabinet syahrir. Tetapi bukannya tanpa rintangan dan hambatan, sebab kelompok Tan Malaka yang berhasil menghimpun banyak golongan dalam masyarakat melakukan oposisi terhadap pemerintahan kabinet Syahrir baik didalam maupun di luar KNIP. Hal itu jelas membahayakan perkembangan kehidupan negara republik Indonesia.

Ketika Syahrir tampil memegang kendali pemerintahan, para pemuda menaruh harapan besar bahwa segala persoalan segera dapat dipecahkan sesuai dengan semangat pemuda revolusioner. Namun harapan itupun segera sirna. Terbentuknya kabinet syahrir 14 Nopember 1945 dan pengumuman program kabinet (17 Nopember 1945) yang terdiri dari 4 pasal menimbulkan banyak kekecewaan di kalangan para pemuda. Kabinet Syahrir di anggap terlalu berbau Belanda, sedangkan programnya dianggap kurang tegas. Adapun isi program tersebut adalah :

1. Menyempurnakan susunan pemerintahan daerah berdasarkan kedaulatan rakyat.
2. Mencapai koordinasi segala tenaga rakyat di dalam usaha untuk membangun negara republik Indonesia dan pembangunan

masyarakat yang didasarkan atas keadilan dan kemanusiaan.

3. Mengusahakan perbaikan kesejahteraan ekonomi rakyat, anatara lain dengan distribusi bahan makananan.
4. Mengusahakan dipercepatnya pemecahan yang memuaskan atas persoalan pagedaran mata uang nasional.³

Kekecewaan para pemuda terhadap Syahrir menyebabkan mereka mencari figur yang teguh dan program yang tegas untuk mengatasi krisis. Figur tersebut mereka temukan pada diri Tan Malaka. Kinerja cabinet Syahrir dalam menyelesaikan sengketa Indonesia-Belanda dengan cara diplomasi sebagaimana telah digariskan oleh Sukarno. Hal ini bertentangan dengan pendirian Tan Malaka yang condong pada cara perjuangan bersenjata.

Pada akhirnya tanggal 4 Januari 1946 di Purwokerto dalam kongres golongan-golongan yang kurang setuju terhadap politik diplomasi, Tan Malaka menganjurkan agar golongan-golongan garis radikal yang tidak dapat menerima garis politik Syahrir membentuk suatu wadah perjuangan sendiri dengan nama Persatuan Perjuangan. Sasarannya adalah untuk merobohkan kabinet Syahrir.

Dari uraian diatas dan masih sedikitnya yang mengangkat tentang organisasi Persatuan Perjuangan menarik peneliti untuk meneliti bagaimana usaha-usaha dan sepak terjang organisasi Persatuan Perjuangan untuk menggulingkan pemerintahan RI yang sah. Dan peneliti membatasi masalah ini dari "latar belakang , kegiatan dan pembubaran organisasi Persatuan Perjuangan", dan peneliti mengambil judul Organisasi Persatuan Perjuangan 1946.

METODE PENELITIAN

Untuk mengungkapkan permasalahan yang akan diteliti penulis menggunakan metode penelitian sejarah. Ada empat tahapan di dalam metode penelitian sejarah yaitu :

1. Penelusuran Sumber (Heuristik)

Pada awal tahap ini, penulis mengumpulkan sumber yang terkait dengan Organisasi Persatuan Perjuangan tahun 1946, sumber tertulis dalam surat kabar sejaman, yang memberikan informasi seputar obyek

² Osman Raliby, *Documenta Historica* (Jakarta : Bulan Bintang, 1953) hal. 23

³ Osman Raliby, *Documenta Historica*, hal. 104

yang dikaji. Adapun klasifikasi sumber penulisan sejarah dalam permasalahan tersebut adalah sebagai berikut, Sumber Primer yang di dapat dari sumber dokumen Negara dan juga Koran yang sejaman. OMI Doc.NO 5503 p.2 (djogja documenten no.65), Laporan kementerian Penerangan, 21 juli 1947 (kem.Penerangan no.239), Laporan Kepala Kementrian Pertahanan Bagian B 21 – 12 – 1946 (djogja documenten no.354), Surat kabar Merdeka Mingguan Oentoek Rakjat edisi 6 Djuli 1946 No.8 halaman 4, Surat kabar Negara Baroe edisi 8 djoeli 1946 artikel Tan Malaka CS. Mentjoba Mereboet Kekuasaan, selain itu juga ada Sumber sekunder: Sumber di peroleh melalui literatur, artikel dan buku-buku yang membahas tentang Organisasi Persatuan perjuangan yaitu Osman Raliby, 1953, Documenta Historica, Jakarta, Bulan Bintang, Slamet Mulyana, 1986, Kesadaran Nasional jilid 3, Jakarta, Inti Idayu Perss, Muhamad Dimiyati, 1951, sejarah Perjuangan Indonesia, Jakarta, penerbit Wijaya Subadiyo S., 1979, Perjuangan Revolusi, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, Yahya A.Muhaimin, 1982, Perkembangan Militer Dalam Politik Di Indonesia 1945-1966, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, Tobing, KML, 1986, Perjuangan Politik Bangsa Indonesia Linggajati, Jakarta, PT Gunung Agung, Harry A. Poeze, 2008, Tan Malaka, Gerakan Kiri, Dan Revolusi Indonesia jilid I, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia,

2. Kritik Sumber

Pada tahap kritik sumber, sumber dikritisi untuk menjadi sebuah fakta dalam upaya penulisan sejarah tentang Organisasi Persatuan Perjuangan tahun 1946.

3. Interpretasi Sumber

Setelah dilakukan kritik sumber terhadap sumber-sumber yang telah diperoleh maka selanjutnya dilakukan interpretasi fakta – fakta yang terkumpul saling dihubungkan sehingga dapat terjadi rekonstruksi sejarah.

4. Historiografi

Pada tahap akhir setelah terjadi rekonstruksi sejarah dalam proses interpretasi maka dilakukan penulisan laporan akhir sebagai hasil penelitian sejarah tentang Organisasi Persatuan Perjuangan tahun 1946.

Proposal ini diharapkan mampu dijadikan acuan untuk calon skripsi yang dapat dipertanggung jawabkan dengan berpedoman pada sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I yaitu Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian.

Bab II yaitu berupa pembahasan mengenai Awal berdirinya Organisasi Persatuan Perjuangan yang terdiri Tujuan dan ide Organisasi Persatuan Perjuangan, Oposisi terhadap pemerintahan.

Bab III merupakan pembahasan mengenai peristiwa-peristiwa pemberontakan yang di dalangi oleh organisasi Persatuan Perjuangan.

Bab IV berupa pembahasan mengenai dampak politik dari organisasi persatuan Perjuangan terhadap pemerintah.

Bab V Penutup yang terdiri dari Simpulan dan Saran.

HASIL DAN KESIMPULAN

Dari hasil penelelitian yang dilaksanakan dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan, dikalangan bangsa Indonesia terbagi atas dua golongan. Yang pertama berpendapat bahwa perjuangan itu harus dijalankan dengan jalan diplomasi guna mencegah jatuhnya korban sia-sia, sedangkan yang kedua condong kepada perjuangan bersenjata, karena mengandalkan semangat, keberanian dan kekuatan bangsa (terutama para pemudanya). Kenyataannya, pemerintah memilih jalan yang pertama , sehingga golongan pendukung jalan kedua menjadi kecewa dan menggalang persatuan dalam wadah yang disebut Persatuan Perjuangan PP.

Di Purwokerto pada tanggal 6 Januari 1946 dalam kongres yang di hadiri oleh 143 organisasi yang menentang kebijakan Sjahrir golongan-golongan yang tidak setuju terhadap politik diplomasi, Pembicara utama dalam kongres tersebut ialah Tan Malaka yang muncul untuk pertama kalinya di depan umum sejak tahun 1922. Dalam pidatonya, Tan Malaka menganjurkan untuk menyusun suatu minimum program yang singkat dan jelas, sehingga seluruh lapisan masyarakat Indonesia dapat mendukungnya. Tan Malaka menganjurkan agar golongan-golongan garis radikal yang tidak dapat menerima garis politik Syahrir membentuk sebuah wadah perjuangan dengan nama Persatuan Perjaungan. Sasarannya ialah untuk merobohkan kabinet Syahrir.

Bila semula PP dimaksudkan untuk menghadapi musuh (terutama belanda). Namun yang terjadi adalah PP tidak lain merupakan alat dari sekelompok orang (terutama Tan Malaka CS.) untuk mengambil alih kekuasaan pemerintahan. Oposisinya terhadap pemerintah RI (Syahrir) tidak menunjang perjuangan bangsa, malahan membahayakan kesatuan dan persatuan bangsa. Peristiwa 27 Juni 1946 jelas merupakan tindakan sabotase terhadap kebijakan politik pemerintah, ketika Syahrir memberikan nota jawaban terhadap Van mook yang hanya berisi tuntutan pengakuan kedaulatan de facto RI atas Jawa

dan Sumatra 27 maret 1946. Membuat golongan PP menjadi kecewa Akibatnya kekecewaan dan kegelisahan golongan oposisi terhadap pemerintah akhirnya meledak berupa tindakan penculikan yang dilakukan oleh suatu gerombolan yang dipimpin oleh Mayor A.K. Yusuf terhadap perdana menteri syahrir dan beberapa pembesar lainnya di Surakarta. Para pembesar itu baru saja melakukan pemeriksaan tempat-tempat penyimpanan padi di Jawa timur (27 Juni 1946). Mereka selain perdana menteri antara lain: Sumitro Joyohadikusumo, Darmawan Mangunkusumo, Mayor Jendral Sudibyo, Maria Ulfah dan Gaus. Dan peristiwa 3 Juli 1946 jelas pula merupakan bukti tindakan makar/kudeta dari golongan Tan Malaka Cs. Untuk dapat memegang kekuasaan pemerintahan negara melalui aksi yang dilakukan oleh Jendral Sudarsono. Aksi dari kelompok Tan Malaka yang paling Ekstrim yakni dilakukan pada tanggal 3 juli 1946 hari yang sama presiden republik Indonesia dipaksa memberhentikan pemerintahan kabinet sutan syahrir dan presiden dipaksa untuk menandatangani kabinet yang telah di bentuk oleh Persatuan Perjuangan yaitu "Dewan Pimpinan Politik" dan susunan kementerian Negara baru, yang melaksanakan perintah tersebut adalah mantan kepala divisi jogja Soedarsono dengan mencatut nama panglima besar soedirman. Ketika Bung Hatta datang, Presiden menunjukan sebuah surat kepadanya dan mengatakan bahwa surat ini menurut Jendral Mayor Sudarsono berasal dari Panglima Besar Soedirman. Isinya ialah permintaan agar kabinet Syahrir dibubarkan dan diganti dengan suatu kabinet baru yang di dalam nya duduk beberapa orang ternama tercantum dalam surat tersebut.

Sebagai dari tindakan tersebut mereka yang terlibat dalam peristiwa itu di kenakan hukuman. Pengumuman resmi pemerintah menyatakan bahwa peristiwa diatas satu kaitan dengan peristiwa penculikan terhadap Perdana Menteri Syahrir pada waktu sebelumnya. Pada tanggal 22 Maret 1946, pemerintah mengumumkan penahanan para pemimpin PP di Surakarta. Penangkapan itu dilakukan oleh pemerintah atas dasar pertimbangan untuk menghindari timbulnya kekacauan dan keresahan dalam masyarakat, atau perpecahan yang menghalangi politik pemerintah. Kesemuanya digerakan oleh komplotan Tan Malaka cs. Tujuan nya yang terakhir ialah menyingkirkan Bung Karno. Dalam tindakan pertama akan menyingkirkan pemimpin-pemimpin Negara dari mulai Wakil Presiden kebawah. Presiden dan Panglima Besar akan mereka gunakan untuk sementara waktu. Kalau mereka sudah merasa kuat Bung Karno dan Panglima Soedirman disingkirkan pula, sehingga dengan demikian kekuasaan menjadi bulat ditangan Tan Malaka cs. Penahanan atas tokoh-tokoh penting yakni Tan malaka, Moh. Yamin, Abikoesno, Sukarni, Chairul saleh, Sayuti melik dan Ahmad Soebarjo dalam PP memberi pukulan berat bagi organisasi ini. Kelompok-kelompok yang semula bersatu dan bekerjasama dalam PP akhirnya tercerai-

berai dan eksistensi PP sepertinya tinggal menghitung hari saja. Akhir dari segala ketidakpastian dari organisasi ini adalah sebuah usulan untuk membubarkan PP. Pada tanggal 4 Juli 1946, anggota-anggota PP yang masih tersisa mengadakan rapat di Yogyakarta. Rapat yang dipimpin oleh Mangunsarkoro itu berjalan sangat alot. Sebagian besar peserta rapat menginginkan agar PP dibubarkan, dan kemudian mendirikan sebuah badan lain untuk menggantikan PP. mengingat tindakan-tindakan di atas dilandasi dan didorong oleh kesetiaan, kecintaan kepada bangsa dan negara maka golongan Tan Malaka Cs. Atas grasi Presiden pada tanggal 17 Agustus 1948 dibebaskan dari penjara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Arsip

- Laporan kementerian Penerangan, 21 juli 1947 (kem.Penerangan no.239)
Laporan Kepala Kementerian Pertahanan Bagian B 21 - 12 - 1946 (djogja documenten no.354)
OMI Doc.NO 5503 p.2 (djogja documenten no.65)

B. Terbitan sejamanMajalah

- Surat kabar Merdeka Mingguan Oentoek Rakjat edisi 6 Djuli 1946 No.8 hal 4
Surat kabar Negara Baroe edisi 8 djoeli 1946 artikel Tan MALAKA CS. Mentjoba Mereboet Kekuasaan
Surat Kabara Berita Republik Indonesia Tahun I No. 2 halaman 10 kolom 3
Surat Kabar Berita Republik Indonesia Tahun I No. 1 halaman 3 kolom 4

C. Buku

- Anthony Reid, 1996, Revolusi Nasional Indonesia, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan
Ben Anderson, 1988, Revolusi Pemuda, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan
George Me'Inman Kahin, 1955, Nasionlisme dan Revolusi di Indonesia, Jakarta : Sebelas Maret University Press bekerja sama dengan Pustaka Sinar Harapan
Harry A. Poeze, 2008, Tan Malaka, Gerakan Kiri, Dan Revolusi Indonesia jilid I, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia
I Nyoman dekker, 1971, Sejarah Indonesia Baru 1945-1949, Malang : IKIP Malang
Marwati Djoened Poesponegoro, 1984, Sejarah Nasional Indonesia V, Jakarta : Balai Pustaka
Muhamad Dimiyati, 1951, sejarah Perjuangan Indonesia, Jakarta : penerbit Wijaya
Mohammad Hatta, 1982, Sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945, Jakarta : Tinta Mas
Osman Raliby, 1953, Documenta Historica, Jakarta : Bulan Bintang
P Y Nur Indro, 2009, Pemikiran Politik Soetan Sjahrir dan Partai Sosialis Indonesia tentang Sosialisme Demokratis, Bandung : Inisiatif Warga

Ricklefs M. C., 2008, Sejarah Indonesia Modern 1200-2008. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta
Rosihan Anwar. R., 2012, Sutan Sjahrir: Demokrasi Sejati, Pejuang Kemanusiaan, Jakarta : Kompas
Slamet Mulyana, 1986, Kesadaran Nasional jilid 3, Jakarta : Inti Idayu Perss
Subadiyo S., 1979, Perjuangan Revolusi, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan
Suparwoto dan Sugiharti, 1997, Sejarah Indonesia Baru 1945-1949. Surabaya : University Press IKIP Surabaya

Tan Malaka, 2012, Gerilya Politik Ekonomi, Depok : Diandra Pustaka Indonesia
Tobing, KML, 1986, Perjuangan Politik Bangsa Indonesia Linggajati, Jakarta : PT Gunung Agung
ULF Sundhahaussen, 1986, Politik Militer Indonesia 1945-1967, Jakarta : LP3ES
Yahya A.Muhaimin, 1982, Perkembangan Militer Dalam Politik Di Indonesia 1945-1966, Yogyakarta : Gajah Mada University Press

